

BAB I

PENDAHULUAN

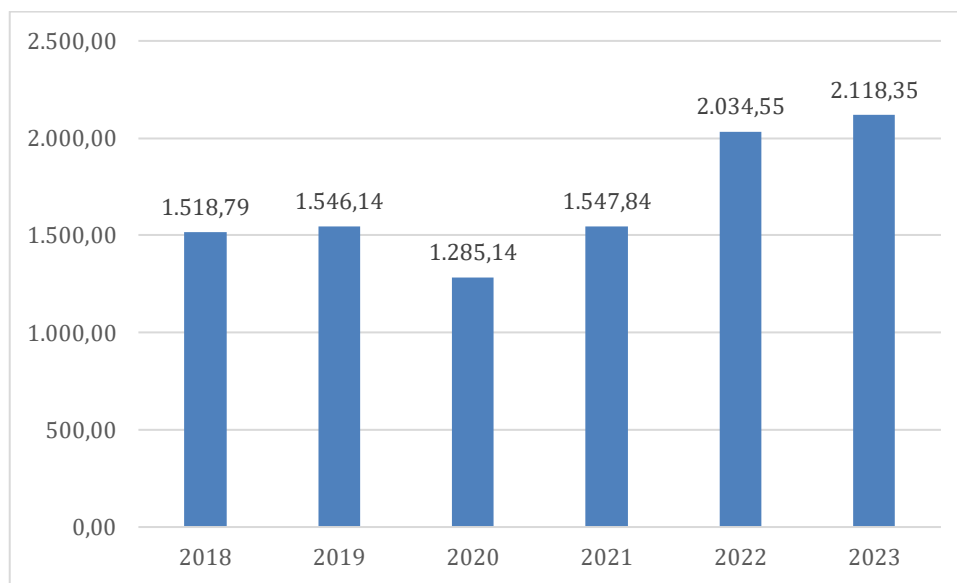
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan terbesar Indonesia berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang. Tercapainya pembangunan yang optimal sangat dipengaruhi dengan adanya penerimaan pajak yang optimal pula. Khairani & Masyitah (2023) menyatakan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan menempuh reformasi perpajakan yang mengandalkan sistem, aturan dan juga kelembagaan, penerimaan pajak juga merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang terbagi bagi dalam beberapa sektor seperti, pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi bangunan (PBB), atau tingkat tertinggi diambil oleh pajak penghasilan.

Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi suatu pendapatan di suatu negara dan mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola ekonomi dan kebijakan perpajakan yaitu dari penerimaan pajak yang ditunjukkan oleh data penerimaan pajak. Nilai penerimaan pajak ini akan menjelaskan jumlah uang yang diperoleh pemerintah dari pemungutan pajak yang dikenakan kepada individu atau badan usaha. Menurut Budi (2019) faktor-faktor yang menentukan pengumpulan pajak juga harus di fokuskan pada basis pendapatan yang biasanya diwakili oleh struktur ekonomi.

Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara juga termasuk kedalam kategori negara berpendapatan menengah. Penerimaan perpajakan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan tren yang

positif selain itu pajak juga merupakan sumber utama pendapatan negara, menyumbang lebih dari 70% dari total penerimaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tingkat pajak di Indonesia dari tahun ke tahun relatif mengalami fluktuasi. Berikut Gambar 1.1 yang menunjukkan data tingkat penerimaan pajak di Indonesia tahun 2010-2023.



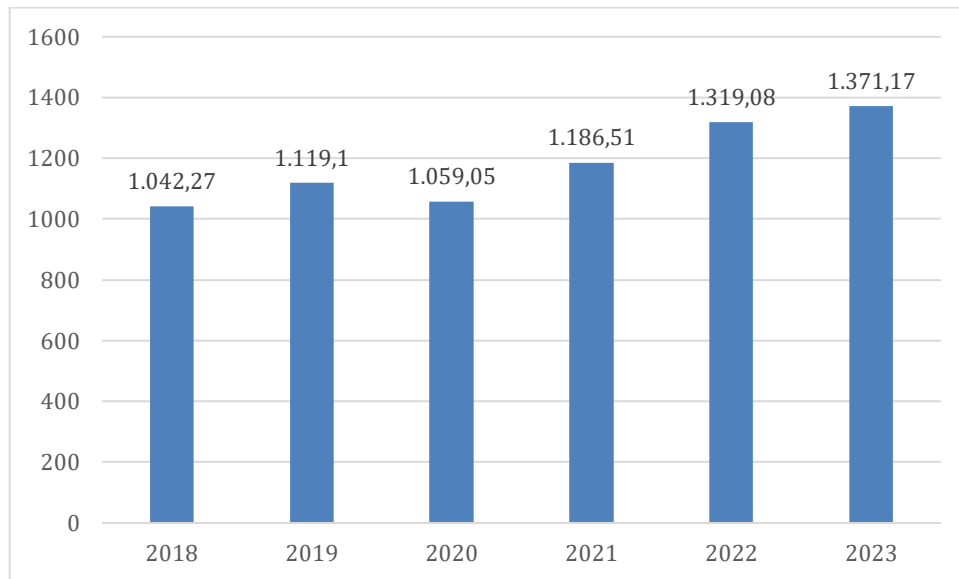
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

**Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak di Indonesia 2018-2023
(Triliun Rupiah)**

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak di Indonesia mengalami kenaikan dan hanya pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak juga menjadi indikator efektivitas sistem perpajakan dan ketaatan wajib pajak. Tingkat partisipasi dan kepatuhan yang rendah, serta tingginya tingkat informalitas ekonomi, menjadi tantangan dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak Saragih. (2018).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya adalah Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Menurut Juliannisa et al (2023) Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mendorong pembangunan negara, terutama pada bidang infrastruktur. Indonesia juga sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan. Peningkatan PDB berdampak pada penerimaan pajak. Suatu negara menyediakan barang dan jasa tertentu kepada anggota masyarakat dan mereka berkontribusi terhadap biaya penyediaan ini secara proporsional dengan manfaat yang diterima, pada dasarnya ada hubungan pertukaran atau kontraktual antara pembayar dan negara. Dengan peningkatan PDB yang diprosikan dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu hal ini juga sejalan dengan teori Keynes. Salah satu kontribusi awal Keynes terhadap teori pajak yaitu argumennya pada saat ekonomi sedang lemah, pemerintah harus menambah pengeluaran dan mengurangi pajak untuk merangsang permintaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan teori pertumbuhan endogen Teori Keynes menerangkan bahwa tingkat kegiatan ekonomi ditentukan dari permintaan agregat. Dari tahun 2020 hingga 2021 situasi ekonomi Indonesia terguncang akibat guncangan wabah penyakit Covid-19, hal ini yang membuat Indonesia tidak mampu bertahan sehingga tidak dapat mengandalkan penerimaan (pajak) domestik yang menutupi kerugian akibat guncangan wabah Covid-19, hingga tahun 2022 masih membutuhkan kekuatan lebih untuk membuat perekonomian Indonesia bangkit. Pajak merupakan komponen utama penerimaan negara yang seharusnya mampu menutupi permasalahan keuangan negara. Berikut Gambar 1.2 yang menunjukkan data tingkat PDB di Indonesia tahun 2018-2023.

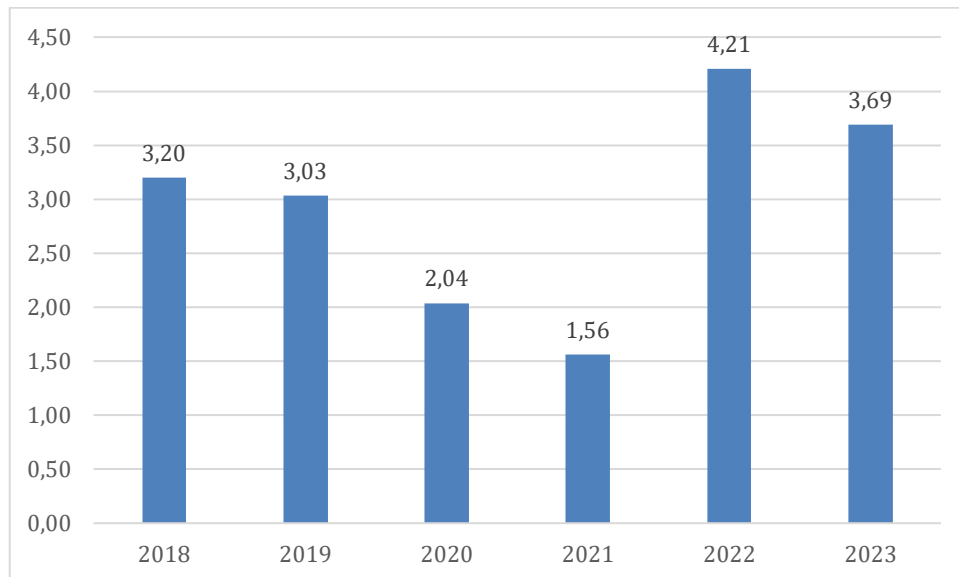


Sumber: *World Bank*, diolah

Gambar 1. 2 Produk Domestik Bruto di Indonesia 2018-2023
(Miliar USD)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa PDB tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan pada tahun 2020 nilai PDB mengalami penurunan, pada tahun selanjutnya PDB mengalami fluktuasi. Jika harga barang yang beredar semakin tinggi maka jumlah uang beredar di masyarakat akan semakin banyak sehingga akan mendorong terjadinya inflasi atau kenaikan harga secara terus menerus Isaac et al (2021). Inflasi mampu mempengaruhi penerimaan pajak dalam negara. Saat terjadi inflasi, harga barang barang secara umum naik yang akan memicu penurunan terhadap permintaan barang. Hal tersebut diikuti oleh perusahaan dengan mengurangi jumlah penawaran barang dengan mengurangi jumlah produksinya, sehingga akan menyebabkan jumlah pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan, dengan demikian juga dengan pendapatan masyarakat karena terjadinya penurunan penggunaan faktor produksi tenaga kerja. Pada

akhirnya hal ini akan menyebabkan penurunan pendapatan baik perusahaan maupun bagi masyarakat, sehingga penerimaan pajak berkurang (Fitri et al., 2020).



Sumber: *World Bank*, diolah

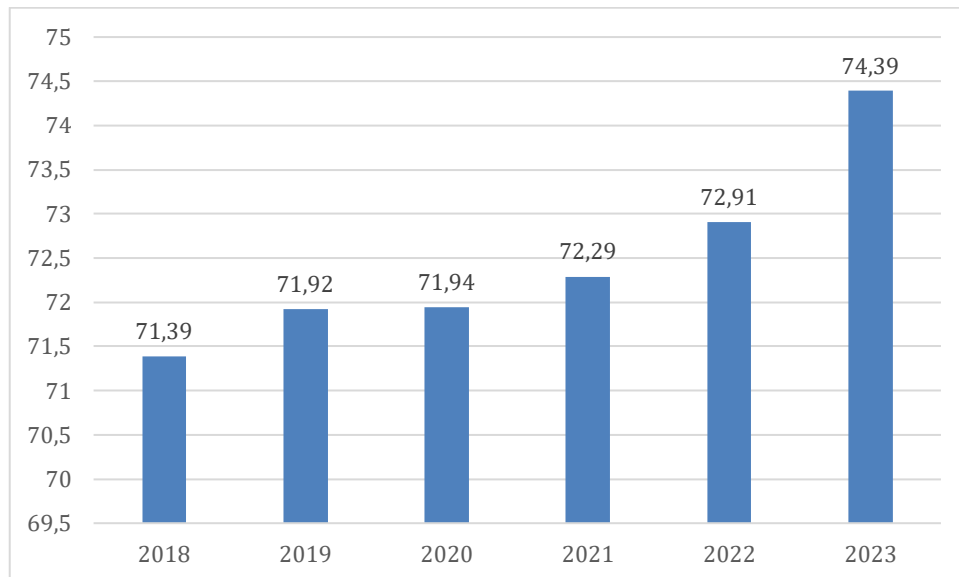
Gambar 1. 3 Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2018-2023
(persen)

Pada Gambar 1.3 terpapar informasi bahwa tingkat inflasi 2018-2021 mengalami penurunan, karena COVID-19 menyebabkan berkurangnya penurunan permintaan.

Indikator selanjutnya yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dasar IPM adalah pentingnya perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan manusia harus mampu mensimulasikan proses yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menurut Kiha (2021) dalam Agustina (2024) Indeks Pembangunan Manusia merupakan instrumen yang ampuh untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan suatu komunitas. Ini mencakup berbagai faktor utama seperti kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Pemanfaatan Indeks Pembangunan

Manusia memungkinkan untuk menilai kemajuan dalam pengembangan manusia.

Hal ini berlaku baik untuk perbandingan antar negara maupun antar daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, dioalah

Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 2018-2023
(Persen)

Pada Gambar 1.4 IPM dari tahun ke tahun mengalami kenaikan karena semakin besar sumber daya yang dimiliki akan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan sumber daya manusia, semakin banyak produktivitas dalam ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak tersebut (Maryantika & Wijaya, 2022). Kemajuan suatu wilayah dapat dinilai melalui pengembangan sumber daya manusia yang merupakan salah satu petunjuk utama. Kualitas individu di suatu daerah menjadi elemen penting yang berdampak pada hasil pengembangan. UNDP memanfaatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai instrument untuk mengukur tingkat efektivitas pengembangan manusia (Agustina et al., 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan penelitian ini menemukan gap atau masalah dalam IPM terhadap penerimaan pajak, yang mana secara teori jika semakin banyak produktivitas dalam ekonomi maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh, peningkatan IPM tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak pada tahun 2020, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terhadap Penerimaan Pajak terdapat penelitian yang dilakukan oleh Juliannisa et al (2023) bahwa PDB memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian dari Singoro (2021) menemukan bahwa IPM memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Dengan melihat fenomena-fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2010-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapat dari latar belakang penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDB, inflasi, IPM secara parsial terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2010-2023?
2. Bagaimana pengaruh PDB, inflasi, IPM secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2010-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDB, inflasi, IPM secara parsial terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2010-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDB, inflasi, IPM secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2010-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pelengkap dan menambah pengetahuan tentang penelitian ekonomi, khususnya mengenai penerimaan pajak Indonesia.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar kajian dalam hal pengambilan kebijakan penerimaan pajak di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi penerimaan pajak di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi pada penelitian selanjutnya, khususnya yang ingin mengetahui tentang penerimaan pajak Indonesia.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mendapatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), *World Bank*, serta dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang didapatkan dari internet dan perpustakaan.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan November 2024 dengan pengajuan judul kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan. Adapun rencana kegiatan penelitian ditampilkan sebagai berikut

